

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)

Sejarah mencatat keberadaan PT. Pos Indonesia begitu panjang, semuanya bermula ketika Gubernur Jenderal G. W. Baron van Imhoff mendirikan kantor pos yang pertama di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1946 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik..

Peranan kantor pos semakin penting dan berkembang setelah penemuan teknologi telegram dan telepon, sehingga dibentuk Jawatan Pos Telegram (Jawatan PTT) berdasarkan statlad nomor 395 tahun 1906. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang perusahaan negara Hindia Belanda (Indische bedrijvewet / IBF). Sejak tahun 1907 Jawatan Pos Telegram (Jawatan PTT) dipegang oleh departemen perusahaan-perusahaan pemerintah (Departement Van Government Bedrijvenment).

Seiring datang tibanya Jepang yang mengambil ahli kekuasaan Belanda di Indonesia, Jawatan PTT Jawa dan Jawatan PTT Sulawesi. Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilan alih kantor pos PTT di Bandung oleh angkatan muda PTT (AMPTT) dari pemerintah militer Jepang. Dalam peristiwa ini gugur sekelompok pemuda

anggota angkatan muda PTT sehingga pada tanggal tersebut menjadi tonggak awal berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai bakti PTT, yang kemudian menjadi hari bakti pariwisata, pos dan telekomunikasi (PARPOSTEL).

Pada tanggal 27 Desember 1949, Jawatan PTT mulai memusatkan perhatiannya pada pembangunan yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, perbaikan perlengkapan bangunan yang rusak dan pembangunan gedung yang baru. Pada tahun 1960 pemerintah mengadakan reorganisasi alat-alat produksi dan distribusi yang ditunjukkan kearah pelaksanaan pasal 33 UUD 1945. Untuk itu dikeluarkan UU No. 19 prp Tahun 1960. Berdasarkan UU tersebut semua perusahaan yang modal keseluruhannya merupakan kekayaan negara, baik yang terjadi karena pemisahan dari kekayaan negara maupun karena nasionalisasi, menjadi Perusahaan Negara (PN).

Dengan PP No. 240 Tahun 1961, dibentuklah perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Dengan PP No. 30 Tahun 1965, PN POSTEL dipecah menjadi dua perusahaan yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1965 Status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelompokkan menjadi tiga status yaitu: Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero).

Selanjutnya status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 24 tahun 1978. Kemudian ditetapkan PP No. 3 Tahun 1983 yang mengatur tata cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum, dan Persero

untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut PP No. 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang Perum Pos dan Giro diganti dengan PP No. 24 Tahun 1984.

Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa pos serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro. Maka perum Pos dan Giro dirubah statusnya menjadi PT. Pos Indonesia (*Persero*) yang diatur melalui PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Febuari 1995.

Tentang pengalihan status Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan Perseroan dengan nama PT. Pos Indonesia (*Persero*) yang secara resmi telah terdaftar dengan akta notaris Sutjipto., SH No. 107 tahun 1995 tanggal 20 Juni 1995.

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah *processing* kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

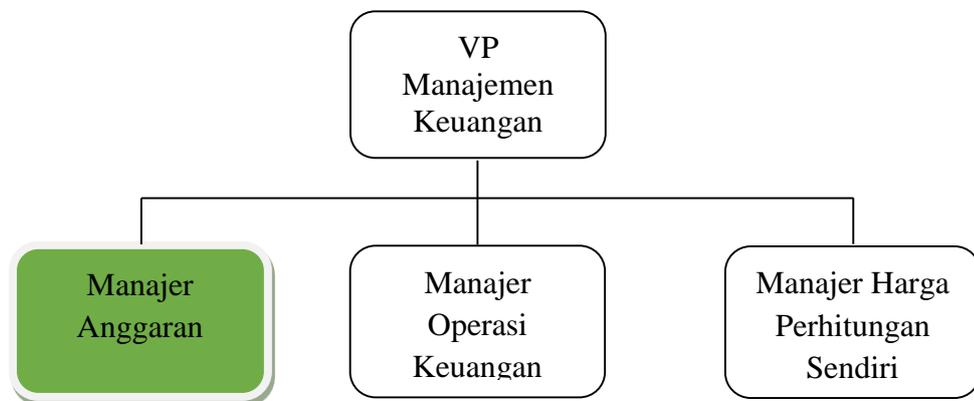
2.1.1 Visi Perusahaan

“Menjadi Raksasa Logistik Pos dari Timur”

2.1.2 Misi Perusahaan

1. Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara
2. Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan
3. Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan
4. Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham

2.2 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Divisi Manajemen Keuangan PT.Pos Indonesia (Persero)

2.3 Deskripsi Jabatan

Dalam mendeskripsikan jabatan penulis hanya membatasi pada Divisi Manajemen Keuangan sesuai dengan kerja praktek yang penulis lakukan.

2.3.1 Divisi Manajemen Keuangan

- ❖ Divisi Manajemen Keuangan dipimpin oleh Vice President Manajemen Keuangan yang selanjutnya disingkat VP. Manajemen Keuangan.
- Tugas pokok Vice President Manajemen Keuangan adalah mengendalikan transaksi keuangan Kantor Pusat, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan mengendalikan anggaran Perusahaan, serta menetapkan harga perhitungan sendiri untuk pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Vice President Manajemen Keuangan dibantu oleh:

- a. Manajer Anggaran
 - b. Manajer Operasi Keuangan
 - c. Manajer Harga Perhitungan Sendiri
- Tugas pokok Manajer Anggaran adalah bertanggung jawab atas penyusunan dan pengalokasian anggaran, dan mengevaluasi realisasi anggaran Perusahaan untuk mencapai pelaksanaan anggaran Perusahaan yang tertib dan benar sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
 - Tugas pokok Manajer Operasi Keuangan adalah bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi keuangan yang berkaitan dengan unit Kantor Pusat dan Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan Kantor Pusat.
 - Tugas Pokok Manajer Harga Perhitungan Sendiri adalah bertanggung jawab atas penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (*owners estimate*) sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

2.4 Aspek Kegiatan PT. Pos Indonesia (Persero)

2.4.1 Bidang Surat dan Paket

1. Filateli adalah hobi mengumpulkan atau mengoleksi dan mempelajari segala hal tentang Prangko dan benda pos lainnya.
2. Admailpos adalah layanan pengelolaan essential mail, advertising mail, Hybrid Mail dan direct mail lainnya.
3. Express Mail Service (EMS) adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen dan barang ke luar negeri.
4. Paketpos adalah layanan hemat untuk pengiriman barang-barang berharga dalam cakupan nasional maupun internasional.

2.4.2 Bidang Jasa keuangan

1. Wesel Pos merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang yang memberikan solusi terhadap kecepatan, ketepatan dan keamanan kiriman uang Anda, secara domestic (Nasional) maupun Internasional.
2. Pospay adalah Pembayaran berbagai tagihan dan angsuran yang dilakukan di Kantorpos yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dengan layanan yang lebih lengkap, lebih cepat dan tentunya akan sangat memudahkan transaksi pembayaran Anda.
3. GiroPos adalah Layanan transaksi keuangan yang berbasis rekening koran sebagai alternatif layanan perbankan dengan jangkauan yang lebih luas dan tersebar di seluruh Indonesia serta terhubung secara real time online untuk penerimaan setoran, penarikan (pembayaran dengan Cek) dan pemindah bukuan menggunakan teknologi berbasis *core banking system*.

4. *Fund Distribution* adalah Layanan penyaluran dana dari perusahaan dan atau lembaga untuk masyarakat (*many to one*) secara *account to cash* atau *account to account*.
5. *Bank Chanelling* adalah Layanan perbankan yang ada di Kantor Pos, meliputi tabungan (*saving*) dan kredit.

2.4.3 Bidang Logistik

1. *Customized* adalah layanan pengiriman barang dengan spesifikasi dan harga sesuai dengan permintaan/kesepakatan
2. Layanan kargo adalah layanan pengiriman barang yang memiliki waktu cepat.
3. *Warehousing* adalah layanan menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan.
4. *Customs Clearance* adalah layanan administrasi pengiriman dan atau pengeluaran barang ke atau dari pelabuhan muat atau bongkar yang berhubungan dengan kepabeanan dan administrasi pemerintah